

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN  
(Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng,  
Kabupaten Banyumas)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**WULAN BUDININGSIH  
NIM. 1522201035**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekuasaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.<sup>1</sup>

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tidak diimbangi dengan pemerataan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dikalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat kemiskinan di Indonesia relatif mudah, apabila indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Upaya pengentasan kemiskinan sudah pasti telah dilakukan pemerintah, melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan *charity*, membagikan uang kepada kaum dhuafa atau manusia yang hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, kelemahan dan ketidakberdayaan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 83.

<sup>2</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 73

program bantuan tunai langsung (BLT). Rupanya solusi yang jitu dalam menanggulangi kemiskinan belum di temukan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa.<sup>4</sup>

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

---

<sup>3</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, .... hlm.83

<sup>4</sup> M. Indra Maulana, "*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>5</sup> Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book:Kementrian Keuangan, 2017

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat;
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Undang – Undang Desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Setidaknya ada dua alasan mengapa masalah pembangunan masih relevan di bahas. *Pertama*, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan mulai susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota. *Kedua*, kendati sejak awal

<sup>6</sup> Risma Hafid, “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pengkep”, Skripsi. Makasar: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

<sup>7</sup> M. Indra Maulana, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>8</sup> Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa, E-Book* : Kementrian Keuangan, 2017

tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah mencanangkan berbagai macam kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan.<sup>9</sup> Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi gradasi terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik. Ini mengandung maksud bahwa program satu dengan yang lain saling mendukung sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan *people driven* dimana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis. Untuk mensukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisi peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.<sup>10</sup>

Strategi sangat diperlukan dalam perihal pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat sangat miskin (*hard rock*), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program

---

<sup>9</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 29

<sup>10</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, .... hlm. 76

pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu hidup mandiri. Menurut Parsons, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Adapun menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Secara lebih rinci oleh Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inofatif.<sup>11</sup>

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian pemerintah desa harus mengabambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. Berkenaan dengan desentralisasi atau otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai

---

<sup>11</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, .... hlm. 51 dan 86

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Desa Melung merupakan desa yang letaknya paling utara di Kecamatan Kedungbanteng, tepatnya di bawah lereng Gunung Selamat. Desa Melung merupakan desa yang terglong tertinggal di Kecamatan Kedungbanteng, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota atau pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, setidaknya sedikit kesempatan kerja di luar pertanian, dan jauh dari pasar.<sup>12</sup> Tercatat sebelum adanya dana desa, Desa Melung masuk kategori desa tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Dengan pernyataan tersebut, maka dalam melakukan pembangunan diperlukan bantuan dana yang akan mengembangkan dan kemudian mensejahterakan masyarakat desanya, lalu kemudian dengan adanya dana desa mampu membuat Desa Melung menjadi desa yang berkembang atau yang disebut Desa Pra-Sembada, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya bantuan dari dana desa, kemudian bertahap dengan program dan strategi dalam memberdayakan masyarakatnya, maka Pemerintah Desa Melung merasa optimis untuk menjadikan Desa Melung menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan wawancara dengan aparat Desa Melung, yaitu Sekertaris

---

<sup>12</sup> Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan kedaulatan Pangan*”, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 1

Desa Melung mengaku optimis untuk bisa menjadikan Desa Melung menjadi desa mandiri. Dengan meningkatkan program pemberdayaan yang akan menciptakan lowongan pekerjaan dan pelatihan-pelatihan yang kemudian nantinya akan bersama-sama membangun desa, juga memperbaiki sarana transportasi seperti memperbaiki akses jalan agar supaya mempermudah untuk masyarakat Desa Melung melakukan kegiatan, ataupun untuk mempermudah wisatawan agar dengan mudah bisa mengunjungi wisata yang ada di Desa Melung, dan pembangunan lainnya.

Besaran dana desa yang diterima oleh desa adalah jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitatan geografis. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.<sup>13</sup> Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Melung :

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa yang diterima Desa Melung Periode 2015-2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp. 289.872.500,00
2	2016	Rp. 643.031.664,00
3	2017	Rp. 820.104.546,00
4	2018	Rp. 907.115.000,00
5	2019	Rp. 1.000.095.388,00

*Sumber : APBD Desa Melung tahun 2015-2019*

Dari data tersebut, alokasi dana desa telah dilakukan sejak tahun 2015 dan 2016 dana desa masih difokuskan untuk pembangunan desa, yaitu dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa, seperti infrastruktur jalan, pengaspalan jalan dan pembuatan jalan pertanian, dan irigasi. Sedangkan pada tahun 2017 sampai sekarang alokasi dana desa selain untuk infrastruktur atau pembangunan desa, seperti pembangunan jalan, irigasi, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan, dan wisata.

<sup>13</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada hari 25 Juli 2019, pukul 10.10

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya program pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Melung adalah melakukan proses yang dijalankan dengan sistematis, kemudian lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Dimana keinginan yang dimaksud adalah keinginan tercapainya visi kepala desa yaitu membentuk Desa Melung yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Ini berarti, pemerintah desa menginginkan agar masyarakat bukan hanya menerima kebutuhan, tetapi harapannya adalah membentuk lapangan pekerjaan, pelatihan yang akan menambah ketrampilan dan wawasan, juga menjadikan Desa Melung mejadi desa yang mandiri, sejahtera. Dengan mengadakan pelatihan seperti pembuatan piring lidi, pelatihan tata boga yaitu hantaran pengantin, pelatihan pengelolaan limbah. Selain pelatihan, ada juga pemberdayaan di sektor wisata, yaitu wisata pagubugan dengan memanfaatkan bengkok sawah. Awalmulanya adalah dengan melihat potensi, karena di Desa Melung merupakan tempat bagi pelepasan dan pengamatan elang jawa, kemudian masyarakat berinisiatif, untuk mengolah bengkok sawah menjadi tempat yang apik, bisa sebagai sarana wisata. Ternyata, dengan adanya wisata pagubugan tersebut, Desa Melung mampu menjadi desa yang diminati dikalangan wisatawan. Dengan adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi pelatihan, pembangunan sarana prasarana, serta dapat mengembangkan potensi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) atau melibatkan masyarakat secara langsung memiliki hasil yang lebih efektif daripada menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari masyarakat luar desa atau desa lain. Ini juga merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan rasa gotong royong antar warga desa.

Islam memandang suatu keberadaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma

yang holistik dan strategis.<sup>14</sup> Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik lagi. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci al-Quran yaitu QS. Ar-Ra'd ayat 11,

ان الله لا يغير ما بقو حتى يغيروا ما بأ نفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

Artinya : *“sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.”*

Arti ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka.

Dan juga dalam surat Al- Mulk ayat 15.

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuruNya dan makanlah sebagian dari rezeki Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dalam (kembali setelah) dibangkitkan”*.

Dari surat tersebut, maka penelitian ini menitik beratkan pada persepsi kemaslahatan, strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini menitik beratkan pada STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG.

<sup>14</sup> Muthoriq dkk, *“Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, hal.426

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat oleh pembaca terhadap judul penelitian ini, maka penulis pertegas istilah-istilah pada judul tersebut :

### 1. Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategeia* (*stratos*= militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewits dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.<sup>15</sup>

### 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>16</sup> Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.3

<sup>16</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 43

<sup>17</sup> *Ibid.*...hlm. 24-25

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

### 3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk : pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>18</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 ayat 8, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

### 4. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD \$ 1 per hari. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatanya berada di posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah

<sup>18</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) , diakses pada hari kamis, 25 Juli 2019, pukul 11.12

<sup>19</sup> Muhamad Nafiudin, "*Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*", Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin di sebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum dijangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang di sebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.<sup>20</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?*

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam memberikan sumbangan ilmu yang diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

---

<sup>20</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global....*, hlm. 84

- c. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulis lainya yang melakukan penelitian ataupun pembahasan lebih lanjut.

#### **E. Kajian Pustaka**

Mengkaji hasil penelitian terdahulu adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan belum ada.<sup>21</sup> Dalam membahas tentang pemberdayaan masyarakat, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Buku Oos M. Anwas yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*” dalam buku ini salah satu babnya membahas konsep pemberdayaan, salah satu teorinya dari Slamet, menekankan bahwa pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.<sup>22</sup>

Sunyoto Usman dalam bukunya yang berjudul “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*” \_\_menjelaskan bahwa masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan dibahas, karena bisa menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu, persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahanya supaya tidak mengganggu stabilitas. Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arisusanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: RinekaCipta, 2000), hlm.75

<sup>22</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*,.... hlm. 49

kehidupan mereka menjadi lebih baik, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat desa.<sup>23</sup>

Abdul Bashith, dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Kemasyarakatan*” mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui tiga pilar, yaitu: mengembangkan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin, memberdayakan kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat miskin, dan meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin.<sup>24</sup>

Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks, dalam bukunya yang berjudul “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*” membahas tentang pembangunan pedesaan, karakteristik desa, fase pembangunan pedesaan, dan skema strategi pembangunan. Dalam bukunya juga mengatakan bahwa pembangunan di negara berkembang harus melihat wilayah pedesaan sebagai fokus dan target pembangunan.<sup>25</sup>

HAW. Widjaya, dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*”, dalam bukunya membahas tentang dasar dan landasan hukum tentang Desa dan Pemerintahan Desa. Otonomi Desa merupakan otonomi daulat, asli dan utuh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>26</sup>

Junaidin Zakaria, dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, dalam salah satu babnya menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana manusia atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok.

<sup>23</sup> Sunyoto Usman, “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”,.... hlm.29

<sup>24</sup> Abdul Bashith, “*Ekonomi Kemasyarakatan*”,.... hlm.17

<sup>25</sup> Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*”, ....hlm. v

<sup>26</sup> HAW. Widjaja, “*Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Kebutuhan yang paling pokok, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya, (Emil Salim).<sup>27</sup>

Selain buku-buku tersebut diatas penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian telah dilakukan oleh Rudiana Mulia dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Ijuk Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)*” menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat desa Cimuncang dilakukan melalui tiga tahap, pertama, upaya yang terarah dengan menciptakan keadaan masyarakat yang berkembang dengan segala potensi yang dimiliki. Kedua, melibatkan seluruh aspek khususnya lapisan bawah yang menjadi sasaran. Ketiga, menegakkan nilai keadilan dan kelayakan dalam arti melindungi.<sup>28</sup>

Feni Yudanti Prasetyaningtyas, dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*”, menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Karangluhur termasuk di dalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Karangluhur termuat dalam peraturan menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat terdiri dari perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencarian, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

Risma Hafid, dalam skripsinya yang berjudul “*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*” menarik kesimpulan bahwa dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan

<sup>27</sup> Junaidin Zakaria, “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 94

<sup>28</sup> Rudiana Mulia, “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)*”, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015

<sup>29</sup> Feny Yudanti Prasetyaningtyas, “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*” Skripsi Semarang: Universtas Diponegoro.

pembangunan desa sudah cukup efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga terlihat cukup baik, dimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.<sup>30</sup>

Indra Maulana, dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*” yang berisi bahwa setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang.<sup>31</sup>

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*” menarik kesimpulan bahwa secara umum penggunaan dana desa berdasarkan sasaran pemberdayaan adalah sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>32</sup>

Mohamad Eko Atmojo, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*” yang berisi bahwa pemberdayaan memang tak lepas dari dibutuhkan partisipasi dari masyarakat yang ikut serta aktif dalam

<sup>30</sup> Risma Hafid, “*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*”, Skripsi Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017

<sup>31</sup> M. Indra Maulana, “*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung)*” Skripsi Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>32</sup> Suwondo dkk, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal 1203-1212.

pembangunan desa yang mulaidari perencanaan yaitu musrenbang, pelaksanaan yaitu masyarakat aktif dalam memberikan usulan pengadaan dan produktifitas desa, dan juga evaluasi masyarakat aktif adalah hal program pengawasan pemerintahan desa, dan juga memberikan masukan serta kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.<sup>33</sup>

Depi Rahayu, dalam jurnalnya yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang*” yang menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut : mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.<sup>34</sup>

Erniyati, dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara*” yang berisi bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di kelurahan desa Semper Barat Jakarta Utara yang dilakukan oleh PPMK menggunakan strategi Aras Mezzo. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana bergulir. Strategi pemberdayaan masyarakat untuk pelatihan komputer diberikan bimbingan berupa dana bergulir yaitu memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau melalui usaha baru. Demikian memperoleh manfaat untuk mereka agar bisa punya keahlian di bidang komputer dan dapat mengembangkan keahlian tersebut dengan membuka usahanya sendiri.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Mohamad Eko Atmojo, dkk. “*Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*” Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017

<sup>34</sup> Depi Rahayu, “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*” Jurnal: Universitas Negeri Semarang, Economics Development Analysis Journal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017

<sup>35</sup>Erniati, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara*”, Skripsi: Univrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2010.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Rudiana Mulia (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Ijuk Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka Jawa Barat)	Proses Pemberdayaan Masyarakat desa Cimuncang dilakukan melalui tiga tahap, <i>pertama</i> , upaya yang terarah dengan menciptakan keadaan masyarakat yang berkembang dengan segala potensi yang dimiliki. <i>Kedua</i> , melibatkan seluruh aspek khususnya lapisan bawah yang menjadi sasaran. <i>Ketiga</i> , menegakkan nilai keadilan dan kelayakan dalam arti melindungi.	Perbedaan dengan peneliti adalah pada sarana yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat. Peneliti menggunakan Dana Desa.
Risma Hafid (2017)	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016	Kemanfaatan untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sudah cukup efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga terlihat cukup baik, dimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.	Perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada strategi pemberdayaan masyarakat, kemudian upaya mengatasi kemiskinan di desa.
Indra Maulana (2018)	Peran Dana Desa Dalam	Adanya dana desa masyarakat mulai	Perbedaannya adalah penulis

	Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gotong-royong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sinar Palembang	lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan yang kemudian berdampak pada pengentasan kemiskinan masyarakatnya
Feni Yudanti Prasetyaningtyas (2015)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo	Pengelolaan keuangan Desa Karangluhur termasuk di dalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat terdiri dari perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencarian, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban	Perbedaannya adalah Peneliti lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan Pemerintah Desa, dalam memberdayakan masyarakat yang nantinya akan mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Erniyati (2010)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara	Strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Desa Semper Barat Jakarta Utara yang dilakukan oleh PPMK menggunakan strategi Aras Mezo. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana bergulir.	Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian pada desa, dan sarana yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui program dana desa.
Depi Rahayu (2017)	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang	Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.	Perbedaannya adalah pada strategi yang digunakan oleh pemerintah desa tentunya berbeda, dan fokus peneliti adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat tersebut mampu mengangkat kemiskinan pada desa tersebut.

Dari beberapa karya dan kajian, setelah penulis mengamati dan menelusirinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan masih belum ada. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa, Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas”.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

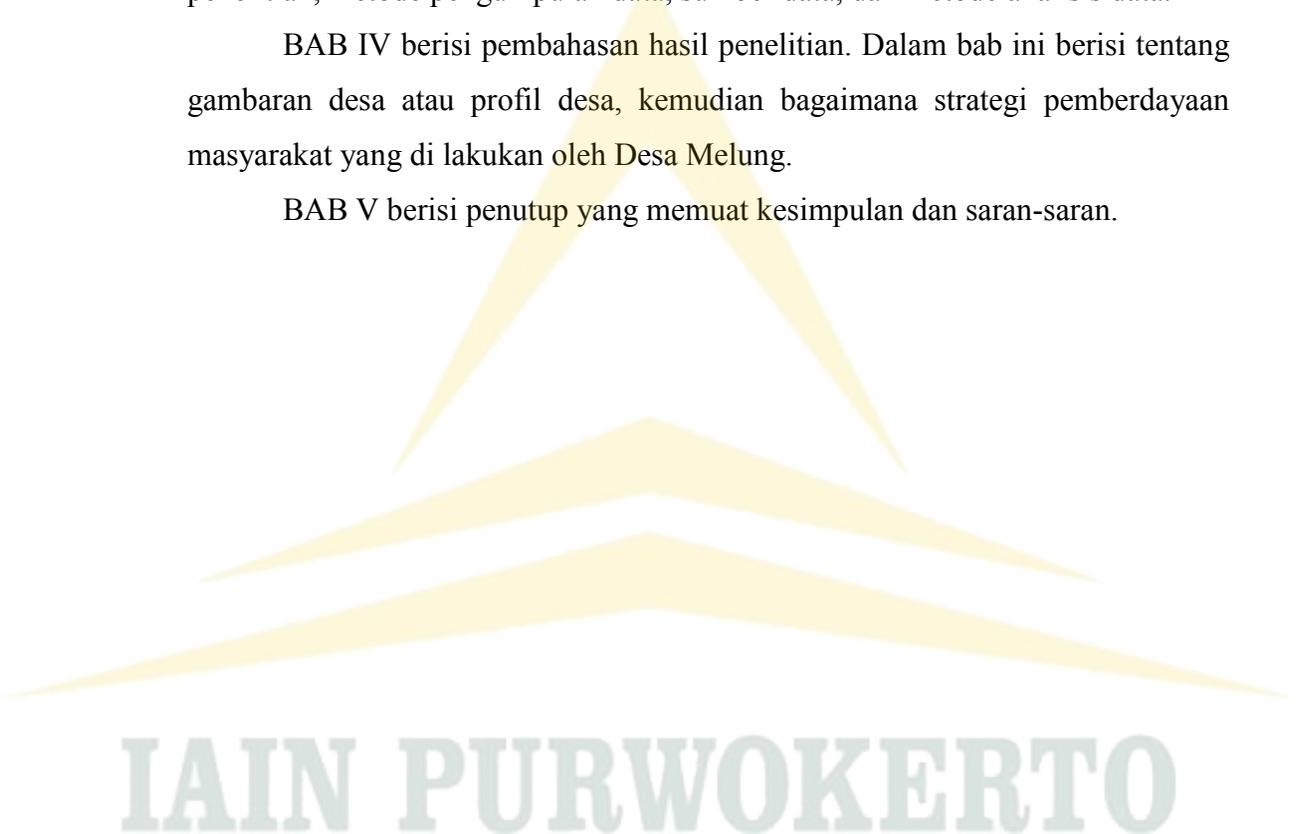
BAB I berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab : latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi mengenai kerangka teoritis yang dibagi menjadi beberapa sub menurut judul yang akan dibahas.

BAB III berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran desa atau profil desa, kemudian bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Desa Melung.

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, pada bab-bab sebelumnya dan berbagai literatur dan penelitian di lapangan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Melung sebelum adanya dana desa memang kurang, sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan keadaan infrastruktur desa masih sangat kurang, seperti jalan, jembatan dan pembangunan desa yang lainnya, karena terbatasnya dana. Setelah adanya kucuran dana desa, pembangunan sudah dirasakan secara merata, seperti pembuatan jalan maupun perbaikan jalan desa, irigasi, talud. Dengan adanya dana desa, selanjutnya diharapkan akan mampu mewujudkan desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Melalui strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Melung, diantaranya adalah pelatihan dan pembuatan wisata, ternyata mampu menyerap tenaga kerja, dan sudah barang pasti memberikan penghasilan atau pendapatan. Dengan pola swakelola, masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat lemah, yaitu pengangguran, masyarakat penyandang disabilitas, dan kaum

perempuan. Selain itu, dari unit wisata, selain memberdayakan juga mampu menyokong PAD dengan jumlah yang cukup besar. Gotong-royong antar warga juga terjalin dengan baik untuk bersama-sama membangun desa.

Sebelum adanya dana desa, Desa Melung termasuk desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa, status desa melung menjadi desa berkembang, dan dengan strategi dan terus berinovasi, maka pemerintah desa mengaku optimis untuk Desa Melung menjadi desa yang maju. Melalui bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah barang pasti bahwa dana desa memang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Melung, tentang strategi pemberdayaan melalui dana desa di sini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

### **1. Bagi Desa Melung**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama penelitian berlangsung di Desa Melung, maka penulis menyarankan untuk Desa Melung semoga lebih maju lagi, bisa terus berinovasi untuk menambah daya tarik wisatawan khususnya, dengan menambah wahana seperti tanaman untuk mempercantik pemandangan di pagubugan, ataupun taman edukasi, dan difasilitasi hiburan atau tontonan seperti kesenian dan pertunjukan. Oleh karena semakin viralnya Desa Melung atau karena adanya wisata, maka sebaiknya dicantumkan berbagai produk dan keunggulan dari Desa Melung itu sendiri ke dalam website Desa Melung, utnuk lebih memasarkan bagaimana keadaan Desa Melung.

### **2. Bagi Praktisi**

Berdasarkan hasil yang digunakan yaitu “Menjadi referensi utama bagi Desa Melung khususnya dan desa lain pada umumnya, untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan produk agar supaya desa memperoleh pendapatan asli desa. Melalui BUMDES, bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang sudah Allah berikan sebagai fasilitas, agar manusia bisa

memanfaatkan sebaik mungkin. Sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakatnya yang ada didesa tersebut. Dengan adanya modal, bisa di buatkan sarana untuk masyarakatnya bisa memperoleh kemanfaatan seperti memperoleh pekerjaan dan penghasilan, kegiatan saling membantu dan memudahkan sesama, semoga bisa memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Amin.

### 3. Bagi Akademisi

Adapun saran bagi kalangan akademisi diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam bidang strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, bisa di kaitkan dengan persoalan yang terjadi sekarang dan akan datang.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- M. Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006)
- Arisusanto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 1988)
- Atmojo, Mohamad Eko dkk. "Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo" *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017
- Badrudin, Rudi. *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
- Bashith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012)
- Departemen Dalam Negeri, Tugas, Fungsi dan Peranannya dalam Pemerintah Daerah, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 1985)
- Erniati. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2010.
- Hafid, Risma. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pengkep", Skripsi. Makasar: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin Makasar, 2017.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015)
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Maulana, M. Indra. "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi refisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Mulia, Rudiana. *”Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)”*, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015

Mulyani, Sri. *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book: mentrian Keuangan, 2017

Muthoriq dkk. *”Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3.

Nafiudin, Muhamad. *”Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Narbuko, Chalid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Prasetyaningtyas, Feny Yudanti. *”Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo”* Skripsi Semarang: Universtas Diponegoro.

Profil Desa Melung

Putra, Windu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: Rajawali Pres, 2018)

Rahayu, Depi. *”Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang”* Junal: Universitas Negeri Semarang, Economics Development Analysis Journal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017

Soepardjo. *Tugas, Fungsi dan Peranannya Dalam Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1985)

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006)

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabaru, 2015)

Suwondo dkk, *”Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan*

*Singosari Kabupeten Malang*), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal 1203-1212.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009)  
Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Tika, Moh. Pabundu. *Metode Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006)

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)

Usman, Sunyoto. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*” (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012)

Widjaja, HAW. “*Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli* ”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.idm.kemendesa.go.id](http://www.idm.kemendesa.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.permendesaPDTTransNo2Tahun2016](http://www.permendesaPDTTransNo2Tahun2016)

Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baksh. “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan kedaulatan Pangan*”, (Malang: Empat Dua, 2016)

Zakaria, Junaidin. “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)

IAIN PURWOKERTO

